



Sistem pangan lokal: Konsep, prospek, dan contoh sukses

Tito Summa Siahaan^{1*}

¹ Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, Jakarta 10430, Indonesia.

*Korespondensi: titosumma@gmail.com

Diterima: 16 Mei 2024

Direvisi akhir: 22 Juli 2024

Disetujui: 31 Agustus 2024

ABSTRAK

Latar Belakang: Artikel ini bertujuan untuk menelusuri beberapa konsep utama dari sistem pangan lokal dan melihat beberapa contoh kebijakan yang diambil di beberapa negara. **Metode:** Pembahasan didasarkan pada tinjauan literatur yang terkait dengan fenomena kajian. **Temuan:** Pemerintahan Indonesia berkomitmen untuk mencapai tujuan keberlanjutan yang tercantum di dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*, di mana pengentasan kelaparan pada 2030 merupakan nomor 2. Dalam pencapaian tujuan SDGs nomor 2 tersebut dan dalam konteks ketahanan pangan secara keseluruhan, kondisi geografis merupakan tantangan utama yang harus dihadapi. Saat ini sistem pangan yang dikembangkan cenderung bersifat sentralistis dan industrialis, yang sejauh ini cukup efektif seperti ditunjukkan melalui beberapa indikator. Namun masih terdapat beberapa wilayah rawan pangan di Indonesia. Untuk wilayah rawan pangan ini penulis berargumen bahwa perlu ada perubahan pendekatan dari yang bersifat sentralistis dan industrialis. Pengembangan sistem pangan lokal (local food system) dapat menjadi salah satu solusi dengan arah untuk memegang fungsi komplementer dari sistem pangan terpusat. Replikasi kebijakan saja tidak akan cukup. **Kesimpulan:** Oleh karena itu, perlu ada pemahaman terhadap karakteristik lokal-spesifik untuk membangun model kebijakan yang sesuai. **Kebaruan/Orisinalitas artikel ini:** Artikel ini menawarkan rekomendasi pentingnya tentang pentingnya sistem pangan lokal bagi wilayah-wilayah yang jauh dari pusat.

KATA KUNCI: contoh; konsep; pangan lokal; prospek.

ABSTRACT

Background: This article aims to explore several key concepts of local food systems and examine some examples of policies adopted in several countries. **Methods:** The discussion is based on a literature review related to the phenomenon under study. **Finding:** The Indonesian government is committed to achieving the sustainability goals outlined in the Sustainable Development Goals (SDGs), where ending hunger by 2030 is goal number 2. In achieving this SDG goal number 2, and in the context of overall food security, geographical conditions pose a major challenge that must be addressed. Currently, the developed food system tends to be centralized and industrialized, which has been fairly effective so far as shown by several indicators. However, there are still some food insecure areas in Indonesia. For these food insecure areas, the author argues that there needs to be a shift away from a centralized and industrialized approach. The development of local food systems can be one solution with the direction to serve as a complementary function to centralized food systems. Policy replication alone will not be sufficient. **Conclusion:** Therefore, there needs to be an understanding of local-specific characteristics to build appropriate policy models. **Novelty/Originality of this article:** This article provides important recommendations on the significance of local food systems for regions that are remote from central areas.

KEYWORDS: example; concept; local food; prospect.

Cara Pengutipan:

Siahaan, T. S. (2024). Sistem pangan lokal: Konsep, prospek, dan contoh sukses. *JIPAGI: Jurnal Inovasi Pangan dan Gizi*, 1(2), 73-80. <https://doi.org/10.61511/jipagi.v1i2.1066>.

Copyright: © 2024 dari Penulis. Dikirim untuk kemungkinan publikasi akses terbuka berdasarkan syarat dan ketentuan dari the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



1. Pendahuluan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2020 sekitar 5,1% dari penduduk Indonesia berada dalam kondisi kerawanan pangan dan sekitar 8,3% mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan (BPS, 2021a). Data BPS juga menunjukkan bahwa setiap tahunnya kedua indikator tersebut mengalami perbaikan. Pada 2011, persentase populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan sebesar 16,46%. Yang perlu menjadi perhatian para pembuat keputusan adalah perbaikan dari kedua indikator tersebut makin mengecil. Hal ini memperlihatkan keterbatasan dari solusi kebijakan yang bersifat sentralistis yang selama ini ditempuh oleh Pemerintah Indonesia, yang efektivitasnya akan berkurang seiring dengan makin banyaknya populasi yang terdampak.

Fakta bahwa sistem pangan Indonesia dikembangkan dengan pendekatan yang terpusat dapat dilihat dari dominasi peran Badan Usaha Logistik (Bulog) dalam pengadaan dan distribusi komoditas pangan. Konsekuensi dari sistem pangan yang terpusat adalah minimnya diversifikasi sumber pangan. Beras mendominasi pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia. Menurut Badan Ketahanan Pangan (BKP) beras berkontribusi sebesar 82,98% dari konsumsi padi-padian masyarakat Indonesia pada 2019 dengan tingkat konsumsi per kapita sebesar 114,3 kg per kapita per tahun, di atas tingkat konsumsi yang dianjurkan, yaitu sebesar 110,4 kg per kapita per tahun (Badan Ketahanan Pangan [BKP], 2020). Corak produksi beras juga merupakan produk dari sistem pangan yang terpusat. Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat secara kumulatif menyumbang lebih dari 50% produksi beras nasional, dengan tingkat produktivitas per hektar yang di atas rata-rata nasional (BPS, 2021b).

Sistem pangan yang terpusat berarti distribusi merupakan komponen penting dalam strategi ketahanan pangan. Menurut BKP (2018), setidaknya ada empat tantangan utama dalam hal distribusi, yaitu (1) akses pangan yang tidak merata, (2) konektivitas antarwilayah yang masih lemah, (3) sebaran wilayah produksi yang terpusat, dan (4) rantai distribusi yang panjang. Mengatasi permasalahan yang terkait distribusi juga penting untuk menjaga stabilitas harga pangan. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan juga infrastruktur yang terbatas menyebabkan biaya logistik yang tinggi yang menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar 23,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Biaya logistik yang tinggi ini menyebabkan disparitas harga komoditas pangan yang tinggi antar wilayah di Indonesia (van der Baan dkk., 2015).

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat kinerja sistem pangan Indonesia. Persentase populasi dalam kondisi kerawanan pangan sedang dan berat menurun dari 8,66% pada 2017 menjadi 5,12% pada 2020 (BPS, 2021c). Tingkat prevalensi ketidakcukupan pangan menurun dari 16,46% pada 2011 menjadi 8,34% pada 2020 (BPS, 2021d) walaupun data pada 2020 menunjukkan peningkatan dibandingkan pada 2019 karena dampak pandemi COVID-19. Indikator *Global Food Security Index* yang disusun oleh the Economist Intelligence Unit (EIU) memperlihatkan skor Indonesia mengalami perbaikan sebesar 6.7 poin dalam periode sepuluh tahun (EIU, 2021). Sementara dalam *Global Hunger Index*, risiko kelaparan di Indonesia menurun dari level serius ke level sedang pada periode 2012-2021 (International Food Policy Research Institute [IFPRI], 2021). Beberapa indikator ini memperlihatkan bahwa kebijakan pangan terpusat menghasilkan kinerja yang cukup baik.

Perlu ada upaya ekstra untuk meneruskan tren baik ini. Sistem pangan lokal dapat memegang fungsi komplementer dari sistem pangan terpusat yang saat ini sudah terbentuk. Pengembangan sistem pangan lokal akan memperpendek jarak tempuh pangan dan memperbaiki aspek keberlanjutan dari sistem pangan nasional. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) (2021), tahap distribusi dan pemasaran menghasilkan *food loss* dan *waste* sekitar 3,2—7,6 juta ton per tahun dan berkontribusi sebesar 20,18% dari buangan gas rumah kaca yang berasal dari sistem pangan nasional. Mencari model kebijakan pengembangan sistem pangan lokal yang sesuai dengan Indonesia merupakan objektif dari artikel ini.

2. Metode

Artikel ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan yang berisikan tinjauan umum terhadap sistem pangan Indonesia. Bagian kedua adalah pembahasan, di mana akan terdapat penjabaran mengenai konsep sistem pangan lokal. Pembahasan ini secara metodologis didasarkan pada literatur akademik dan juga melihat beberapa model kebijakan yang telah diterapkan di beberapa negara.

Bagian terakhir adalah kesimpulan dan saran. Simpulan ini berdasarkan argumen utama bahwa sistem pangan lokal merupakan solusi yang ideal di wilayah-wilayah yang jauh dari sumber pangan dan sebaiknya memegang fungsi komplementer. Dengan demikian, sistem pangan tersebut tidak menggantikan sistem pangan terpusat yang sudah terbentuk sekarang, tetapi melengkapinya.

3. Hasil dan Pembahasan

Sistem pangan lokal hadir sebagai kritik terhadap sistem pangan modern yang telah melalui proses industrialisasi, komersialisasi komoditas pangan, dan globalisasi. Ada beberapa definisi utama mengenai sistem pangan lokal (Martinez et dkk., 2010; Coelho dkk., 2018; Béné, 2020; Stein & Santini, 2021). Definisi pertama berdasarkan pendekatan geografis, dengan karakteristik utama sistem pangan lokal adalah jarak yang pendek antara sumber dan konsumen komoditas pangan. Belum ada konsensus dalam mendefinisikan jarak yang pendek. Penelitian oleh Kinnune dkk. (2021) menetapkan batasan jarak tempuh 100 kilometer untuk pangan lokal. Kedua, sistem pangan lokal dapat juga didefinisikan apabila karakteristik masyarakat setempat, baik dalam corak produksi, pemilihan varietas, maupun pola konsumsi, dominan. Terakhir, sistem pangan lokal juga dapat didefinisikan dengan rantai pasok yang pendek, yang biasanya apabila terjadi interaksi yang langsung antara produsen dan konsumen (Low dkk., 2016).

Ada beberapa celah dalam konsep sistem pangan lokal. Salah satunya adalah tidak adanya definisi yang pasti, seperti telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini menjadikan pengertian sistem pangan lokal bergantung kepada interpretasi masing-masing pengusungnya. Konsep sistem pangan lokal juga seolah-olah bertujuan untuk menggantikan sistem pangan modern. Desrochers (2019) mengatakan bahwa pengusung konsep sistem pangan lokal membangun argumen dari asumsi-asumsi yang salah dan menyebabkan banyak permasalahan dalam sistem pangan secara global, yang kemudian dapat diatasi oleh sistem pangan modern.

Kritik tersebut dapat dijawab dengan memosisikan sistem pangan lokal sebagai pelengkap dari sistem pangan modern. Walaupun sistem pangan lokal hadir sebagai kritik terhadap sistem pangan modern, tujuan utama yang sering dikedepankan adalah pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat lokal, terutama mereka yang terpinggirkan sebagai konsekuensi dari komersialisasi komoditas pangan. Oleh karena itu, sistem pangan lokal dilaksanakan pada skala kecil dan tidak menekankan pada komersialisasi komoditas pangan. Sistem pangan lokal dalam skala kecil dan rantai pasok yang pendek akan lebih responsif dalam situasi krisis, seperti yang terjadi selama pandemi Covid-19 (Nemes dkk., 2021).

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pengembangan sistem pangan lokal bertujuan untuk mendiversifikasi sumber pangan dan komoditas pangan untuk dikonsumsi. Hal ini, apabila dilaksanakan dengan baik, dapat memperkuat aspek ketahanan pangan. Keterkaitan antara diversifikasi pangan dan ketahanan pangan berdasarkan konsep ilmu ekologi, yaitu diversifikasi respons. Menurut Elmqvist dkk. (2003), ekosistem dengan biodiversitas tinggi akan menghasilkan respons yang beragam terhadap gangguan, yang mempunyai fungsi penting dalam hal pembaruan dan reorganisasi ekosistem. Dalam konteks sistem pangan, gangguan dapat datang melalui penurunan produktivitas atau gagal panen pada sumber utama.

Salah satu konsep yang erat kaitannya dengan sistem pangan lokal adalah jarak tempuh pangan (*food miles*). Jarak tempuh pangan merupakan indikator yang mengukur jarak antara sumber produksi dan konsumsi dengan asumsi utama bahwa makin jauh jarak tersebut, maka makin tinggi dampak lingkungannya (Coelho dkk., 2018). Konsep jarak tempuh pangan sendiri banyak digugat, terutama jika berbicara mengenai tingginya efisiensi logistik dalam sistem pangan modern (Coley dkk., 2009; Desrochers, 2019). Walaupun terdapat banyak kritik, konsep *food miles* memperkuat perspektif lingkungan dalam sistem pangan.

Prancis merupakan salah satu negara yang menerapkan kebijakan sistem pangan lokal yang ambisius. Pada 2016, Prancis mengesahkan undang-undang yang mengharuskan seluruh restoran dan kafetaria untuk mendapatkan 40% dari kebutuhan komoditas pangan dari sistem pangan lokal (McNamara, 2016). Selanjutnya, pada 2018, Pemerintah Prancis mengumumkan kebijakan yang akan efektif tahun 2022 untuk 50% pengadaan komoditas pangan untuk keperluan publik harus merupakan produk organik atau diproduksi oleh sistem pangan lokal (FarmingUK, 2018). Pemerintah Prancis menggunakan istilah *peredaran pendek* (*short circuit*) sebagai karakteristik utama dari sistem pangan lokal, yang dioperasionalkan dengan interaksi langsung antara produsen dan konsumendengan jarak tempuh pangan tidak lebih dari 150 kilometer (Coelho dkk., 2018).

Penting untuk melihat dinamika di lapangan, yang kemudian mendorong Pemerintah Prancis menerbitkan kebijakan yang ambisius untuk mendorong sistem pangan lokal. Pertama, sektor pangan mempunyai peran penting bagi perekonomian Prancis dengan nilai penjualan sebesar 198 miliar euro dan menyerap tenaga kerja sebesar 433,000 pada 2018 (France Ministry of Agriculture and Food, 2021). Statistik ini dapat menjelaskan mengapa Pemerintah Prancis mengambil kebijakan yang mendukung sistem pangan lokal. Kedua masyarakat Prancis mempunyai tradisi gastronomi yang kuat dengan preferensi yang kuat terhadap komoditas pangan lokal. Spielmann & Bernelin (2015) melakukan kajian terhadap preferensi konsumen pangan di Prancis dan menemukan keterkaitan yang kuat antara bentuk relasi sosial dan dukungan terhadap sistem pangan lokal. Giovanangeli (2013) mengatakan bahwa sistem pangan lokal di Prancis merupakan gerakan sosial yang lahir dari aktivisme-aktivisme akar rumput.

4. Kesimpulan

Artikel ini telah menjabarkan beberapa konsep utama dari sistem pangan lokal, kritik, dan klarifikasi. Konsep sistem pangan lokal berawal dari kritik terhadap sistem pangan modern. Konsep sistem pangan lokal memberikan penekanan terhadap corak produksi, pola rantai pasok, dan jarak tempuh pangan dengan konteks lokal. Sistem pangan lokal dapat mendiversifikasi sumber produksi pangan dan varietas komoditas pangan yang akan memperkuat ketahanan sistem pangan secara keseluruhan. Sistem pangan lokal juga dapat mengurangi jejak karbon dan *food loss* dan *waste* di Indonesia. Skala operasi yang kecil dan rantai pasok yang pendek juga membuat sistem pangan lokal lebih responsif terhadap guncangan. Aspek ini penting mengingat perubahan iklim akan membawa dampak yang signifikan terhadap sistem pangan secara global.

Kritik terhadap konsep sistem pangan lokal mengatakan bahwa sistem pangan modern telah banyak membawa perbaikan yang signifikan terhadap ketahanan pangan global. Selain itu, sistem pangan modern juga tumbuh untuk mengisi kekurangan sistem pangan tradisional, yang sedikit banyak terkait dengan konsep sistem pangan lokal, dalam memenuhi kebutuhan pangan. Namun, penting untuk diingat bahwa sistem pangan lokal berbicara mengenai kebutuhan pangan masyarakat lokal, bukan untuk menggantikan sistem pangan modern. Sistem pangan lokal harus dikembangkan untuk melengkapi sistem pangan modern.

Dalam konteks Indonesia dan kebijakan sistem pangan yang terpusat dan dalam skala besar, maka sistem pangan lokal dapat menjadi kebijakan tambahan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Pengembangan sistem pangan lokal di Indonesia dapat

mengambil referensi dari model kebijakan di Prancis. Mengambil referensi dari kebijakan pangan di Prancis tidak bertujuan untuk imitasi kebijakan secara mutlak, tetapi untuk mendapatkan pemahaman bagaimana realitas di lapangan membentuk model kebijakan yang ambisius. Oleh karena itu, ada beberapa saran kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia.

Pertama, pengembangan sistem pangan lokal membutuhkan data beresolusi tinggi. Beberapa data yang dibutuhkan misalnya porsi konsumsi pangan nasional yang bersumber dari sistem pangan domestik atau lokal, jarak tempuh pangan, porsi komoditas pangan yang dipasarkan melalui pasar modern, tradisional atau peritel yang bersumber dari sistem pangan lokal dan preferensi masyarakat Indonesia terhadap pangan lokal. Kedua, saat ini terdapat momentum yang kuat dalam digitalisasi perdagangan pangan, yang dapat memperpendek rantai pasok pangan nasional. Upaya ini masih cenderung menggunakan perspektif makro seperti pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk mempermudah akses digital. Pengembangan kapasitas produsen pangan lokal penting untuk diperhatikan dalam upaya digitalisasi ini.

Ketiga, dengan mencontoh kebijakan di Prancis, dapat diterapkan kebijakan kewajiban minimum bagi supermarket dan restoran di kota besar seperti Jakarta untuk mulai menggunakan produk pangan lokal. Kewajiban minimum ini sebaiknya dimulai dari angka yang kecil namun dibarengi dengan rencana untuk meningkatkan komitmen secara bertahap. Kebijakan serupa juga bisa diterapkan pada sektor publik dalam hal pengadaan pangan yang bersumber dari sistem pangan lokal. Keempat, sistem pangan lokal harus dimulai dari perspektif untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal. Oleh karena itu, inisiatif yang datang dari akar rumput harus diberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, perlu ada upaya untuk memperkuat relasi antara sistem pangan lokal dengan masyarakat setempat melalui kampanye-kampanye dan strategi pemasaran. Kelima, sistem pangan lokal harus diposisikan sebagai pelengkap dari sistem pangan nasional yang terpusat. Oleh karena itu, sistem pangan lokal sebaiknya dikembangkan di wilayah-wilayah yang jauh dari jangkauan sistem pangan nasional dan mempunyai tujuan yang spesifik untuk memperkuat ketahanan pangan.

Kontribusi Penulis

Penulis berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menggunakan pendanaan eksternal.

Pernyataan Dewan Peninjau Etis

Tidak berlaku.

Pernyataan *Informed Consent*

Tidak berlaku.

Pernyataan Ketersediaan Data

Tidak berlaku.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Akses Terbuka

©2024. Artikel ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0, yang mengizinkan penggunaan, berbagi, adaptasi, distribusi, dan reproduksi dalam media atau format apa pun. selama Anda memberikan kredit yang sesuai kepada penulis asli dan sumbernya, berikan tautan ke lisensi Creative Commons, dan tunjukkan jika ada perubahan. Gambar atau materi pihak ketiga lainnya dalam artikel ini termasuk dalam

lisensi Creative Commons artikel tersebut, kecuali dinyatakan lain dalam batas kredit materi tersebut. Jika materi tidak termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel dan tujuan penggunaan Anda tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau melebihi penggunaan yang diizinkan, Anda harus mendapatkan izin langsung dari pemegang hak cipta. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Daftar Pustaka

- Badan Ketahanan Pangan. (2020). *Road Map Diversifikasi Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras (2020-2024)*. Retrieved from <http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/uploads/public/5f6/18c/e7a/5f618ce7a70dc489660982.pdf>.
- Badan Pusat Statistik. (2021a). Laporan Indeks Khusus Penanganan Stunting 2019-2020. Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/2021/09/08/3b622d713a80363685aef508/laporan-indeks-khusus-penanganan-stunting-2019-2020.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2021b). *Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Menurut Provinsi 2019-2021*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/indicator/53/1498/1/luas-panen-produksi-dan-produktivitas-padi-menurut-provinsi.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2021c). *Prevalensi Penduduk Dengan Kerawanan Pangan Sedang Atau Berat, Berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/indicator/23/1474/1/prevalensi-penduduk-dengan-kerawanan-pangan-sedang-atau-berat-berdasarkan-pada-skala-pengalaman-kerawanan-pangan.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2021d). *Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/indicator/23/1473/1/prevalensi-ketidakcukupan-konsumsi-pangan.html>.
- Bappenas. (2021). *Laporan Kajian Food Loss and Waste di Indonesia*. Retrieved from <https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/06/Report-Kajian-FLW-FINAL-4.pdf>.
- Béné, C. (2020). Resilience of local food systems and links to food security – A review of some important concepts in the context of COVID-19 and other shocks. *Food Security*, 12(4), 805–822. <https://doi.org/10.1007/s12571-020-01076-1>.
- BKP. (2018). *Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024*. BKP.
- Coelho, F.C., Coelho, E.M., & Egerer, M. (2018). Local food: Benefits and failings due to modern agriculture. *Scientia Agricola*, 75(1), 84–94. <https://doi.org/10.1590/1678-992x-2015-0439>.
- Coley, D., Howard, M., & Winter, M. (2009). Local food, food miles and carbon emissions: A comparison of farm shop and mass distribution approaches. *Food Policy*, 34(2), 150–155. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2008.11.001>.
- Desrochers, P. (2019). *The Myths of Local Food Policy: Lessons from the Economic and Social History of the Food System*. Retrieved from <https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/myths-of-local-food-policy.pdf>.
- EIU. (2021). *Global Food Security Index: Rankings and Trends*. Retrieved from <https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/Index>.
- Elmqvist, T., Folke, C., Nyström, M., Peterson, G., Bengtsson, J., Walker, B., & Norberg, J. (2003). Response diversity, ecosystem change, and resilience. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 1(9), 488–494. [https://doi.org/10.1890/1540-9295\(2003\)001\[0488:RDECAR\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1890/1540-9295(2003)001[0488:RDECAR]2.0.CO;2).
- FarmingUK. (2018). *France to make half of all food in public sector organic or local by 2022*. Retrieved from <https://www.farminguk.com/news/france-to-make-half-of-all-food-in-public-sector-organic-or-local-by-2022-48536.html>.

- France Ministry of Agriculture and Food. (2021). *An overview of france's agrifood industries*. Retrieved from <https://agriculture.gouv.fr/overview-frances-agrifood-industries-edition-2021>.
- Giovanangeli, A. (2013). Local French Food Initiatives in Practice: The Emergence of a Social Movement. *PORTAL Journal of Multidisciplinary International Studies*, 10(2), 1–23. <https://doi.org/10.5130/portal.v10i2.3026>.
- International Food Policy Research Institute (IFRI). (2021). *Global Hunger Index: Indonesia*. Retrieved from <https://www.globalhungerindex.org/indonesia.html>.
- Low, S.A., Adalja, A., Beaulieu, E., Key, N., Martinez, S., Melton, A., Perez, A., Ralston, K., Stewart, H., Suttles, S., & Vogel, S. (2015). Trends in U.S. local and regional food systems. *Local and Regional Food Systems: Trends, Resources and Federal Initiatives*, 068, 87–195. https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/42805/51173_ap068.pdf.
- Martinez, S., Hand, M., da Pra, M., Pollack, S., Ralston, K., Smith, T., Vogel, S., Clark, S., Lohr, L., Low, S., & Newman, C. (2010). Local food systems: Concepts, impacts, and issues. *Local Food Systems: Background and Issues*, 97, 1–75. <https://www.ers.usda.gov/publications/pub-details/?pubid=46395>.
- Mcnamara, E. (2016). *New law could change France's food system for the better*. Retrieved from <https://www.csmonitor.com/Business/The-Bite/2016/0201/New-law-could-change-France-s-food-system-for-the-better>.
- Nemes, G., Chiffolleau, Y., Zollet, S., Collison, M., Benedek, Z., Colantuono, F., Dulstrud, A., Fiore, M., Holtkamp, C., Kim, T. Y., Korzun, M., Mesa- Manzano, R., Reckinger, R., Ruiz-Martínez, I., Smith, K., Tamura, N., Viteri, M. L., & Orbán, É. (2021). The impact of COVID-19 on alternative and local food systems and the potential for the sustainability transition: Insights from 13 countries. *Sustainable Production and Consumption*, 28, 591–599. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.06.022>.
- Spielmann, N. & Bernelin, M. (2015). Locavores: Where you buy defines who you are. *International Journal of Retail and Distribution Management*, 43(7), 617–633. <https://doi.org/10.1108/IJRDM-03-2014-0028>.
- Stein, A.J. & Santini, F. (2022). The sustainability of “local” food: a review for policy-makers. *Rev Agric Food Environ Stud*, 103, 77–89. <https://doi.org/10.1007/s41130-021-00148-w>.
- van der Baan, C., Meeuws, R., & Sandee, H. (2015). *State of Logistics Indonesia 2015*. Center of Logistics and Supply Chain Studies, Institut Teknologi Bandung (ITB), Asosiasi Logistik Indonesia, STC-Group and the World Bank, February, 74.

Biografi Penulis

Tito Suma Siahaan, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.

- Email: titosumma@gmail.com
- ORCID: -
- Web of Science ResearcherID: -
- Scopus Author ID: -
- Homepage: -